



Midji Akan Tuntaskan Terkait Rp 2,8 M

■ Pemprov Raih Opini WTP dari BPK RI

PONTIANAK, TRIBUN - Pemprov Kalbar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (9/5/23).

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis Akrua, telah diungkapkan

secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan Keuangan telah didukung dengan SPI yang efektif, sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Provinsi Kalbar Tahun 2022 Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Pius Lustrilanang.

Meskipun demikian BPK-RI masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan adanya beberapa temuan yang dinilai masih tidak menimbulkan kerugian, untuk segera dilakukan, diselesaikan dengan baik.



IST/ADPIM

PENYERAHAN - BPK serahkan LHP kepada Pemprov Kalbar yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Kalbar, Selasa (9/5/23).

Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu terkait pengelolaan aset tetap dan aset lainnya yang dianggap

belum tertib, serta aset yang belum tercatat pada Kartu

■ Bersambung ke hal. 10



Midji Akan Tuntaskan Terkait

Inventaris Barang, pemanfaatan dan penggunaan aset tetap dan aset lainnya belum tertib dan tidak sesuai ketentuan.

"Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalbar," ujarnya.

Dirinya juga berharap pada Tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran, serta kesejahteraan masyarakat Kalbar perlu ditingkatkan kembali.

"Saya berharap agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI kepada Pemprov Kalbar untuk segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalbar beserta jajaran-nya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe-

meriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," tegasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sutarmidji mengungkapkan terima kasihnya kepada BPK-RI yang telah memberikan Opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang telah memberikan Opini WTP. Tak lupa apresiasi untuk seluruh jajaran Pemprov Kalbar serta seluruh pihak hingga masyarakat yang telah memberikan kontribusinya yang nyata bagi pembangunan Kalimantan barat," ujar Gubernur Kalbar.

Terkait catatan dari BPK-RI, Midji bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar akan melakukan perbaikan dengan waktu yang diberikan oleh BPK-RI.

"Kemudian ada kegiatan sekitar Rp. 2,8 miliar itu, Rp. 2,3 miliar karena kurang volumenya dan harus dikembalikan, sebagian be-

sar sudah disetorkan kembali. Inshaallah sebelum sebulan itu sudah selesai. Kemudian, terkait penurunan angka pengangguran terbuka, kemiskinan dan gini rasio kita (Pemprov Kalbar) lebih baik dari nasional sekitar 0,386 dan Kalbar 0,315 jadi sangat-sangat jauh. Kemudian lainnya saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.

Ia menilai, semua sudah sesuai dengan standar akuntansi, temuannya tidak material. Orang nomor satu di Kalbar ini juga berkomitmen, akan diselesaikan sebelum 60 hari.

"Kalau asset itu ada 300 item dan 100 itemnya belum bersertifikat dan lainnya belum dinilai, apakah dinilai dari appraisal atau DJKN kita belum diketahui. Kemarin saya sepakat untuk penilaiannya menggunakan NJOP saja untuk menghitung asset tersebut dan masih menunggu apakah diperbolehkan atau tidak," pungkasnya. (ang)